

AKTIVISME TRANSNASIONAL *THE ASIAN PEASANT COALITION* DI INDONESIA

Muh. Asy'ari

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa
asyari@universitasbosowa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berlatar keberadaan gerakan petani transnasional dan keterlibatan gerakan petani lokal Indonesia dalam politik agraria transnasional. Penelitian ini mengambil studi kasus *Asian Peasant Coalition* (APC) sebagai organisasi tani transnasional di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan telaah dokumen dan wawancara, penelitian ini berupaya menjelaskan aktivisme transnasional *Asian Peasant Coalition* (APC) dalam membentuk identitas kolektif dan mendorong perlawanan organisasi petani lokal di Indonesia.

Untuk menjelaskan hal-hal di atas, penelitian ini menggunakan konsep Transnational Activism yang dikembangkan oleh Sidney Tarrow untuk menganalisa mekanisme dan aktivitas transnasionalnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori framing dalam identitas kolektif untuk menganalisa bagaimana solidaritas gerakan petani transnasional dan gerakan petani lokal dapat terbentuk dan terjaga selama proses advokasi berlangsung.

Penelitian ini menemukan dan menyimpulkan bahwa pembentukan isu kolektif perampasan tanah lokal dikampanyekan dan diadvokasi pada level global oleh APC dilakukan melalui lima tahapan perkembangan *Transnational Contention*. Dampak kelima fase inilah yang memungkinkan isu gerakan petani lokal menjadi bagian dari gerakan transnasional dan pada akhirnya akan melahirkan solidaritas gerakan guna mendukung perlawanan petani di tingkatan lokal. Pada konteks inilah solidaritas dan identitas kolektif gerakan petani transnasional terbentuk dan memungkinkan lahirnya aktor transnasional di level lokal.

Kata Kunci: *Aktivisme Transnasional, Asian Peasant Coalitions, Gerakan Petani*

ABSTRACT

This research is based on the existence of the transnational peasant movement and the interaction of the Indonesian local peasant movement in transnational agrarian politics. This research takes a case study of the Asian Peasant Coalition (APC) as a transnational farmer organization in Indonesia. Using qualitative methods carried out by reviewing documents and interviews, this study seeks to explain the transnational activism of the Asian Peasant Coalition (APC) within the collective identity and encourage the struggle of local peasant organization in Indonesia.

To explain the above, this study uses the Transnational Activism concept developed by Sidney Tarrow to analyze and transnational activities. In addition, this study also uses framing theory in the collective to analyze how the solidarity of transnational farmer

movements and local farmer movements can be formed and maintained during the advocacy process.

This research finds and concludes that the ordering of local land grabbing collective problems campaigned and advocated at the global level by APC is carried out through the stages of development of Transnational Contention. The impact of this phase is what supports the problems of local farmers to become part of the national movement and will eventually create solidarity movements to support farmers at the local level. It is in this context that the solidarity and collective identity of the transnational peasant movement is formed and enables the birth of transnational actors at the local level.

Keywords: *Transnational Activism, Peasant Movements, Asian Peasant Coalitions*

PENDAHULUAN

Gerakan petani adalah gerakan sosial paling tua yang lahir dari kontradiksi masyarakat agraria di seluruh dunia. Sejarah kemunculan gerakan petani telah ada sejak zaman komunal primitif, kolonialisme, hingga zaman modern sebagai dampak nyata dari transformasi sosial yang terjadi pasca kelahiran kapitalisme di Eropa atau Revolusi Industri (Fauzi, 2005). Gerakan petani tumbuh dan berkembang pesat di setiap negara yang memiliki basis masyarakat agraria terutama di negara dunia ketiga yang mengalami ketimpangan oleh struktur kapitalisme global termasuk yang terjadi di Indonesia (Fauzi, 1999; Wiradi, 2000; Luthfi et. al., 2010).

Rentang sejarah perjuangan petani di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan nasional dimana petani sebagai kelas sosial dominan dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional hingga dewasa ini. Kaum tani dipandang sebagai kelompok masyarakat yang termarginalkan oleh sistem kapitalisme yang mengambil alih lahan melalui mekanisme akumulasi primitif yakni proses perampasan tanah rakyat tani lalu menciptakan proses lahirnya tenaga kerja berlebih hingga melahirkan konflik dan kemiskinan masyarakat agraria (Fauzi, 2012:139).

Pentingnya pengkajian terkait petani didasari oleh dua faktor yaitu, *pertama*, relasi posisi petani sebagai kelas sosial dengan jumlah penduduk terbanyak dan karakter Indonesia sebagai negara agraris yang berarti masih bertumpu pada sektor

pertanian. *Kedua*, posisi petani sebagai penyangga kedaulatan pangan yang menjadi sumber pokok kehidupan suatu negara, sebuah negara yang tidak mampu berdaulat atas pangan maka negara tersebut telah berada dalam lingkaran negara yang mengabaikan aspek keamanan manusianya.

Situasi agraria yang semakin kompleks dengan ditandainya banyaknya konflik agraria dan perebutan ruang membuat petani harus berhadapan dengan negara ataupun dengan pihak swasta berupa sengketa kepemilikan lahan ataupun sengketa kebijakan HGU yang memaksa petani di tingkatan lokal untuk melawan dan membentuk gerakan perlawanan mereka (Fauzi, 1999; Mustamin, 2007).

Dinamika situasi pengorganisasi, konsolidasi, dan advokasi dan perlawanan inilah yang kemudian mengkonstruksi solidaritas gerakan petani hingga pada akhirnya memunculkan sejumlah aliansi organisasi tani yang mengklaim diri berada di tataran nasional. Organisasi tani inilah yang juga kelak menjadi bagian dari gerakan petani transnasional di Indonesia dengan melibatkan diri dalam satu payung organisasi tani global yang memiliki kesamaan kepentingan dan pandangan dalam melihat permasalahan agraria (Borras, 2005).

Konstruksi solidaritas sebagai alat perjuangan petani di tingkat lokal yang dibawa dan direpresentasikan secara bertingkat hingga ke pusran transnasional adalah sisi terbaru dalam melihat pola gerakan dan perlawanan yang dibangun oleh organisasi petani di Indonesia.

Keberadaan gerakan petani transnasional dan keterlibatan gerakan petani lokal Indonesia dalam politik agraria transnasional serta proses pembentukan gerakan kolektif dalam menanggapi isu dan masalah petani global yang sama menjadi satu kajian menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini mengambil studi kasus aktivisme transnasional Asian Peasant Coalition (APC) sebagai organisasi tani transnasional yang membangun gerakannya di Indonesia. APC membentuk gerakan bersama koalisi internasional dan organisasi tani nasional sebagai respon terhadap isu perampasan tanah yang terjadi di Indonesia terutama terkait konflik-konflik perampasan tanah yang terjadi di tingkatan lokal dan melahirkan resistensi dari masyarakat petani tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian ilmu sosial yang bersifat deskriptif dan berupaya untuk menginterpretasi sebuah fenomena yang terjadi. Penelitian ini akan mencoba mencari data dan informasi secara mendalam melalui penelitian lapangan, sumber tertulis, dan wawancara untuk memperoleh data yang lebih mendalam dari pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian ini. Data tersebut akan dianalisa dengan mempelajari konteks atau situasi sosial fenomena tersebut sehingga dapat menjelaskan dan menyajikan data-data yang dibutuhkan secara utuh.

Penelitian ini akan berfokus pada upaya untuk memahami dan menganalisa aktivisme transnasional APC sebagai organisasi petani transnasional yang membentuk solidaritas dan identitas kolektif petani di level lokal. Lebih jauh, penelitian ini juga berupaya untuk melihat pengaruh aktivisme transnasional tersebut terhadap perkembangan gerakan petani di Indonesia.

Dalam menganalisa pengaruh gerakan petani transnasional APC terhadap gerakan petani di Indonesia, penulis menggunakan konsep *Transnational Activism* yang diajukan oleh Sidney Tarrow dan teori framing identitas kolektif. Konsep

Transnational Activism digunakan untuk menganalisa mekanisme dan aktivitas transnasional APC dalam mencapai tujuannya gerakannya.

Tarrow menjelaskan *Transnational Activism* sebagai agenda transformatif yang akan mengubah aktor dalam protes domestik menjadi pelaku gerakan transnasional dengan tetap mengakar pada konteksnya sejarah dan kultur gerakan lintas batasnya. Transformasi ini bisa menjadi perantara dalam gerakan sosial pada level global menuju satu identitas antara banyak identitas lokal, nasional, dan transnasional (Tarrow, 2005). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori *framing* dalam identitas kolektif untuk menganalisa bagaimana solidaritas gerakan petani transnasional dan gerakan petani lokal dapat terbentuk dan terjaga selama proses advokasi berlangsung (Larana et.al., 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asian Peasant Coalition dan Upaya Pembentukan Gerakan Petani Transnasional di Indonesia

Asian Peasant Coalition pertama kali berdiri pada Konferensi Petani Asia yang berlangsung pada 29-30 Maret 2003 di Filipina. Perkembangan konsolidasi gerakan APC dapat ditelusuri pada saling berkaitannya beberapa kelompok-kelompok gerakan sosial di berbagai negara yang seringkali terlibat dalam satu forum di tingkatan internasional. Dimotori oleh organisasi tani dari berbagai negara terutama India, Filipina, dan beberapa negara lainnya akhirnya menyepakati untuk membentuk satu organisasi tani di tingkatan Asia guna memfokuskan diri pada perjuangan petani miskin dan buruh tani yang masih banyak tersebar di Asia serta guna sebagai satu organisasi yang mendukung perjuangan petani lokal di tiap-tiap negara anggota.

Beberapa organisasi yang berperan dalam pembentukan APC adalah Kilusang Magbubukid ng Philipinas (KMP) dan Andhra Pradesh Vyavasaya Vruthidarula Union (APVU) beserta 26 organisasi tani lainnya mendukung pembentukan APC tersebut. Salah satu aksi besar yang dilakukan oleh APC bersama beberapa

organisasi gerakan lainnya ialah melakukan aksi bersama menolak WTO pada Konferensi Tingkat Tinggi di Hongkong pada tahun 2005. APC memandang bahwa isu perdagangan bebas yang digulirkan oleh WTO dianggap memberi dampak buruk bagi kehidupan pertanian, dalam hal ini liberalisasi pertanian sebagaimana diamanatkan dalam Agreement on Agriculture, di banyak negara termasuk di negara-negara Asia yang mayoritas berkarakter agraris.

APC mengklaim diri mereka sebagai koalisi petani miskin, petani tidak bertanah, nelayan, masyarakat adat, petani perempuan serta pemuda tani di seluruh Asia. APC melaksanakan sidang umum pertamanya pada bulan November 2004 di Bangladesh. Sidang umum ini difasilitasi oleh dua organisasi tani di Bangladesh yaitu Bangladesh Krishok Federation (BFK) dan Bangladesh Kishani Sabha (BKS). Dalam pernyataan sikap yang dibacakan bersama, secara terang APC menyatakan diri sebagai:

"We are poor because the land, water, seed and natural resources are control by a few landlord and agrochemical transnational corporations (TNCs). The forced "structural adjustment" of our agriculture by the World Bank-International Monetary Fund (WB-IMF) collaboration and the imposition of globalization policies by the World Trade Organization (WTO) intensify imperialist exploitation and further aggravate impoverishment" (APC, 2004)

APC memiliki memiliki lebih dari 15 juta anggota yang mewakili lebih dari 20 organisasi yang berasal dari 11 negara di Asia seperti Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka dan Thailand. APC juga memiliki jaringan internasional yang luas di Afrika, Eropa, dan Amerika Latin yang berfokus pada gerakan perlawanan berbasis petani lokal demi upaya penciptaan reforma agraria dan kedaulatan pangan serta dengan menyatakan sikap penolakan terhadap agenda imperialisme global (APC, 2020).

Di Indonesia, APC berafiliasi dengan organisasi tani nasional Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). AGRA pertama kali dibentuk oleh sejumlah activist tani dan petani dari berbagai daerah pada tahun 2003 yang dibentuk pasca runtnya Orde Baru meskipun pada dasarnya, kemunculannya diawali dari berbagai medan konsolidasi gerakan-gerakan petani di tingkatan lokal di berbagai daerah di Indonesia. Pada perkembangannya, AGRA menaruh perhatian lebih pada isu perampasan tanah yang terjadi di sejumlah Indonesia.

AGRA dan APC terlibat aktif dalam perjuangan dan kampanye terkait praktek perampasan tanah. Gerakan perlawanan tersebut diorganisir dalam bentuk beragam kampanye antara lain "Peasant, Rise Up!", untuk mendukung perjuangan petani di berbagai negara untuk bangkit dan melawan konflik agrarian yang terjadi serta kampanye "Stop Global Land Grabbing" yang dibentuk oleh APC bersama koalisi internasional lainnya sebagai bentuk tanggapan maraknya kasus perampasan tanah yang terjadi di berbagai negara.

Program perjuangan lain yang dikampanyekan di Indonesia ialah "Day of the Landless" atau "Hari Kaum Tidak Bertanah" yang diperingati setiap 29 Maret sebagai momentum bagi organisasi tani untuk memperluas perjuangan atas tanah bagi petani tak bertanah di seluruh dunia.

Hampir setiap tahun, Hari Petani Tidak Bertanah diselenggarakan oleh APC bersama koalisi internasionalnya antara lain People Coalition on Food Sovereignty (PCFS), Pesticide Action Network (PAN) Asia Pasific, Koalisi "No Land, No Life" dan Youth for Food Sovereignty-YFS bersama organisasi tani lokal di seluruh negara anggota APC.

Fokus advokasi APC adalah perjuangan akses terhadap tanah sebagai aspek penting dari kehidupan pedesaan dan masyarakat. Akan tetapi meningkatnya komodifikasi tanah di tengah kebijakan di banyak negara yang semakin jauh dari proses reformasi agraria yang menjamin hak rakyat atas tanah menjadi latar belakang semakin minimnya akses dan kontrol masyarakat pedesaan atas tana dan sumber daya alam. Perkembangan global dan regional, termasuk krisis

ekonomi global yang terus berlanjut dan dorongan tak henti-hentinya untuk lebih meliberalisasi pertanian, munculnya kekuatan ekonomi baru membutuhkan sumber bahan mentah, dan semakin masifnya kekerasan terhadap gerakan petani juga dianggap menciptakan kondisi kerentanan atas konflik konflik dan perampasan tanah yang semakin meningkat di daerah pedesaan (GRAIN, 2018)

Di Indonesia, munculnya kontradiksi-kontradiksi baru di dalam masyarakat petani terhadap kebijakan negara yang dianggap tidak berpihak terhadap petani serta kuatnya arus modal yang mencoba mengambil alih lahan pertanian melalui mekanisme global land grabbing yang ditandai dengan semakin maraknya konflik agraria dengan beragam pelaku.

Laporan Komnas HAM RI mencatat bahwa konflik agraria masih masif terjadi, hal tersebut tercermin dari data pengaduan sepanjang 2017 yang mencapai 269 kasus; terdiri dari konflik lahan (104), perkebunan (39), infrastruktur (32), pertambangan (24), kehutanan (24), lingkungan (19) dan penegakan hukum (23). Luas objek yang menjadi akar konflik agraria yang berhasil didata adalah seluas 2.713.369 Ha. Pengaduan pada 2017 tersebut meningkat dibanding 2015. Tim Penanganan Konflik Sumber Daya Alam Komnas HAM RI mencatat sebanyak 109 (seratus sembilan) kasus terkait permasalahan sengketa dan/atau konflik lahan yang berhubungan dengan sumber daya alam (Komnas HAM, 2019)

Konflik agraria di Indonesia tidak hanya telah mengakibatkan marjinalisasi terhadap masyarakat lokal tetapi juga kerap memakan korban jiwa. Kondisi yang semakin jauh dari harapan atas kedaulatan tanah tersebut membentuk sikap penolakan petani yang diusung oleh AGRA. Hal inilah diyakini menjadi factor pendorong dalam membentuk gerakan petani yang lebih luas. Isu perampasan tanah global ini kemudian menjadi isu bersama dalam aktivitas politik Asian Peasant Coalitions dalam rangka menggalang solidaritas organisasi petani di Indonesia yang nantinya akan membentuk solidaritas perlawanan yang berskala internasional.

Pembingkiaan Identitas Kolektif

Agenda utama APC ialah menghadirkan gagasan dan perluasan isu perlawanan petani melalui aktivitas transnasional. Gerakan petani transnasional dan gerakan petani lokal di Indonesia juga dituntut untuk dapat mempertahankan dan menjaga solidaritas sebagai modal perlawanan bersama. Untuk menganalisa bagaimana gerakan petani transnasional dan gerakan petani lokal bertahan dan mengembangkan solidaritas melalui proses pembentukan agenda bersama dan upaya mengenali musuh bersama maka akan digunakan konsep framing dalam identitas kolektif. Identitas kolektif ialah elemen penting bagi gerakan petani transnasional untuk bisa membingkai isu dan gagasan perlawanan bersama dengan petani lokal lainnya di seluruh dunia melalui proses pembingkiaan sehingga keyakinan kolektif akan terbentuk dan ditransformasikan melalui interaksi antarindividu secara organisasional.

Fenomena massifnya kemunculan gerakan petani transnasional di era globalisasi menjadi lebih luas, terbuka, dan massal coba dijelaskan oleh McAdam, Tarrow dan Tilly di bukunya *Dynamics of Contention*. McAdam dkk menyatakan bahwa gerakan sosial kondusif terjadi pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan transisi menuju perubahan sosial. Pada situasi transisional seperti itu akan menyebabkan semakin terbukanya kesempatan aktor untuk merespon, memobilisasi struktur-struktur sosial dan budaya yang ada sehingga memungkinkan dilakukannya komunikasi, kordinasi, dan komitmen di antara para actor sehingga pada gilirannya menghasilkan kesamaan pengertian (persepsi dan definisi tentang situasi) yang memunculkan kesadaran bersama tentang apa yang sedang terjadi (McAdam et.al., 2001).

David A. Snow, Robert D. Benford dan Scott A. Hunt dalam tulisan mereka *Identity Fields; Framing Processes and the Social Contraction of Movement Identities* mendefinisikan frame sebagai; “*interpretive schemata that simplifies and condenses the “world out there” by selectively punctuating and encoding objects, situations, events, experiences and sequences of actions within one’s present or past environment*”. Dalam konteks gerakan

sosial, pbingkain identitas kolektif tidak hanya fokus atau menekankan "realitas" tetapi mereka juga berfungsi sebagai mode persebaran ide. Pbingkain identitas kolektif menjadi syarat untuk membentuk identitas kolektif dengan memusatkan perhatian pada situasi tertentu yang dianggap bermasalah, membuat labelisasi mengenai siapa atau apa yang dianggap bermasalah, dan mengartikulasikan serangkaian agenda alternatif, termasuk apa yang harus dilakukan untuk mencapai perubahan yang diinginkan (Larana et.al., 1994:190).

Framing akan menuntun gerakan untuk mengenali medan dan sumber daya guna memobilisasi gerakan yang lebih besar. Proses identifikasi sumber daya dan actor dalam gerakan ini dibagi atas tiga kelompok. Pertama, Protagonist Identity yang berkaitan dengan identitas individu dan kolektif yang dibangun oleh gerakan petani transnasional di Indonesia untuk menjadi pendukung berkembangnya gerakan. Ini termasuk klaim identitas kolektif tentang "gerakan" dan sekutu agregasi dan organisasi yang sepaham dan segaris perjuangan atas isu yang diusung. Kedua, Antagonist Identity berkaitan tentang identitas individu dan kolektif gerakan petani yang diperhitungkan menjadi lawan gerakan atau hambatan dalam membangun gerakan petani transnasional yang lebih kuat. Ini termasuk klaim tentang countermovements, organisasi gerakan lawan, lembaga musuh, serta agen kontrol sosial. Ketiga, Audience Identity berkaitan tentang identitas individu dan kolektif yang diperhitungkan menjadi pengamat netral atau uncommitted yang mungkin bereaksi terhadap kegiatan gerakan.

Robert Benford dan David Snow dalam tulisan mereka *Framing Process and Social Movement; An Overview and Assessment* memaparkan tiga model proses pbingkain yaitu diagnostic framing, prognostic framing, dan motivational framing. Proses pbingkain diagnostic merujuk pada usaha gerakan sosial dalam hal ini gerakan petani transnasional memaparkan bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami oleh para petanni di seluruh dunia. Proses ini sering kali dimanknai sebagai cara untuk mengidentifikasi

"korban" yang disebabkan oleh ketidakadilan, menjelaskan bentuk pengorbanan yang dialami oleh petani dan bagaimana sebuah kondisi timpang berdampak terhadap kehidupan petani dan gerakannya yang nantinya akan menuntun penelitian ini menggambarkan idnetifikasi yang dilakukan oleh gerakan petani dan siapa lawan mereka.

Merujuk kepada proses pbingkain prognostic dimanknai sebagai bentuk gerakan petani untuk mengartikulasikan usulan-usulan atau solusi yang tawarkan oleh gerakan petani terhadap permasalahan yang kemudian disusun sebagai agenda aksi bersama yang harus tetap konsisten. Proses ini akan digunakan untuk menganalisa bagaimana gerakan petani transnasional berupa kebijakan pertanian yang tidak memihak petani semisal impor pangan yang nilai jaulanya lebih murah ketimbang produk nasional sehingga menentukan pemerintah dan segala bentuk kebijakan pertanian yang bercorak liberal dan demi kepentingan indutrsi pangan global yang bertanggung jawab atas ketimpangan yang dialami oleh petani sekaligus menentukan sikap yang harus dilakukan untuk mengubah keadaan tersebut.

Terakhir, pbingkain motivational component adalah proses final dari tugas pbingkain, yaitu menyediakan dasar rasional keterlibatan dalam aksi kolektif yang nantinya akan melahirkan component penting dalam gerakan yakni "agen", yaitu pihak yang terlibat sebagai bagian dari aksi pbingkain kolektif. Agen dalam gerakan petani adalah organisasi yang terlibat dalam agenda perlawanan bersama baik oleh kelompok petani itu sendiri ataupun kelompok diluar petani akan tetapi merasakan kondisi timpang yang sama semisal kaum buruh dan masyarakat miskin kota yang sering kali menjadi bagian aksi gerakan petani transnasional di Indonesia.

Isu Perampasan Tanah sebagai Isu Kolektif Global

Tantangan terbesar organisasi gerakan petani transnasional dalam merespon isu adalah melakukan identifikasi dan menyusun agenda perjuangan bersama. Identifikasi adalah salah satu komponen penting dari gerakan kolektif, proses

identifikasi didorong oleh untuk hendak memahami dan mengenali kekuatan dalam satu aksi kolektif yang nantinya akan mempertajam ideologi politik dan mengkalkulasi kesempatan dan kesatuan sebuah aksi kolektif. Proses identifikasi berguna membentuk solidaritas yang merefleksikan keyakinan satu kelompok dalam sebuah gerakan yang besar bisa bersatu dan memperjuangkan tujuannya secara bersama-sama.

Berangkat dari konsep "framing" dalam studi gerakan sosial yang diajukan oleh David Snow dan Robert Benford yang menjelaskan framing sebagai "schemata of interpretation" yang hadir untuk mengatur pengalaman dan menuntun aksi kolektif gerakan guna menarik pendukung serta meraih perhatian media. Lebih jauh dengan menggunakan panduan tersebut, gerakan petani transnasional nantinya melakukan proses pembingkai diagnostic framing dengan memaparkan berbagai bentuk ketidakadilan yang dihadapi oleh masyarakat terhadap ketimpangan penguasaan tanah sehingga memungkinkan adanya muncul satu kesadaran bersama terhadap penindasan tersebut.

Pembingkai prognostic bekerja untuk menganalisa dan memberikan satu kesimpulan sebagai pedoman bagi gerakan petani untuk menuntun dan melakukan perlawanan, pada konteks ini *land reform* masih menjadi jawaban terhadap ketimpangan ini. Terakhir, pembingkai motivational berperan untuk mendorong terbentuknya satu gerakan yang kuat untuk melakukan perlawanan, AGRA dengan anggotanya ditingkatkan lokal serta APC sebagai organisasi gerakan transnasional dipandang sebagai "agen" dalam menyuarakan perlawanan mereka.

Proses pembingkai isu perampasan tanah ditingkat lokal, di setiap negara anggota gerakan petani transnasional inilah yang menjadi pokok utamanya, isu perampasan tanah pada konteks ini dipandang sebagai isu domestic yang saling mencuat dan berkaitan di banyak tempat. Setelah memperhitungkan peluang kesempatan dan ancaman politik dalam struktur politik yang terbuka akan menuntun kita pada kesamaan isu gerakan atau dengan kata lain, karena isu dan praktik perampasan tanah

ada di banyak tempat maka perlawanan pun harus ada di banyak tempat pula. Mobilisasi isu perampasan tanah global muncul dan semakin menguat dengan banyaknya dukungan politik dari kelompok agraria yang memadamkan isu perampasan tanah sebagai isu utama sekaligus pokok dalam melihat kebijakan.

Isu perampasan tanah dikerangkai sebagai isu bersama yang mampu menyatukan identitas, munculnya petani tak bertanah dan korban penguasaan tanah memungkinkan bagi gerakan petani ditingkat lokal untuk mendayagunakan sejumlah potensi nilai-nilai lokal untuk mendorong perlawanan petani tersebut. Pada sisi lain, para kelompok yang berperan sebagai penguasa atas tanah mereka diletakkan sebagai pihak yang harus dilawan. Mereka adalah tuan tanah, korporasi nasional dan asing serta instansi internasional yang mendukung dan menjadi pendorong terjadinya politik perampasan tanah yang terjadi diseluruh dunia termasuk di berbagai tempat di Indonesia. Secara spesifik, AGRA dan APC menempatkan feodalisme pada level lokal dan nasional sebagai aktor yang berkolaborasi dengan kepentingan kapital internasional melalui skema imperialisme, yakni suatu skema penguasaan atas negara lain, sehingga memungkinkan terjadinya perampasan tanah tersebut. Untuk menjamahnya, dibutuhkan sejumlah regulasi dan peraturan pemerintah yang dianggap bersebarangan dengan pihak petani dan masyarakat adat yang tidak lagi memiliki akses terhadap tanah.

APC didukung oleh organisasi koalisinya memobilisasi isu perampasan tanah sebagai senjata utama mereka dalam melihat ketimpangan dan kemiskinan yang masih menyelimuti masyarakat pedesaan di negara-negara Asia tersebut. Pandangan mereka tentang perampasan tanah sebagai akar pemiskinan masyarakat petani tentunya menjadi basis analisa mereka, hilangnya akses atas sumber agraria sebagai penopang mata pencarian dominan masyarakat pedesaan di Asia dipandang tidak berkontribusi terhadap kemiskinan dan kelaparan dan kebanyakan petani di Asia. Sebagian besar petani tidak memiliki tanah yang mereka garap dan terikat oleh hubungan feodal dan semi-feodal yang

eksploitatif. Hal ini pulalah yang diamini oleh AGRA sebagai organisasi anggota APC di Indonesia.

Dalam konteks kerangka berpikir seperti ini, maka yang sesungguhnya terjadi adalah suatu gerakan perlawanan balik petani baik berbentuk *reclaiming* atau *counter claim* terhadap kekuasaan dan hegemoni kapitalis dan negara yang dipandang berkuasa dan dominan atas penguasaan tanah dan sumber daya alam lainnya. Pada penelitian ini, fokus utamanya ada pada organisasi gerakan petani transnasional sebagai payung gerakan petani pada level global sebuah dalam membingkai isu perampasan tanah yang terjadi di banyak negara termasuk Indonesia yang nantinya akan membentuk satu agenda kampanye yang bersifat global.

Pembentukan Transnational Contention terhadap Isu Perampasan Tanah di Indonesia

Upaya untuk memunculkan isu perampasan tanah global di Indonesia pada aras global tidak dapat dilepaskan dari kerja organisasi petani transnasional yang ada. Kemunculan isu lokal terkait perampasan tanah ditingkatkan gerakan petani transnasional adalah titik awal yang menandai bergabungnya berbagai organisasi gerakan petani tingkat lokal hingga nasional di banyak dan kelompok yang mendukung perjuangan agraria lainnya menentang praktik perampasan tanah global. Perseteruan pada aras transnasional terkait isu perampasan tanah global oleh APC dan AGRA melawan kebijakan negara yang dianggap merugikan petani, juga dengan korporasi nasional dan internasional serta kekuatan modal lainnya yang didukung pula oleh institusi internasional dijelaskan oleh Sidney Tarrow dalam *Power in Movement; Social Movement and Contentious Politics* sebagai *Transnational Contention*. (Tarrow, 2011:234)

Proses *Transnational Contention* inilah yang memungkinkan munculnya isu perampasan tanah lokal pada arena global, dengan menggunakan kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Tarrow yang menjelaskannya ke dalam lima fase perkembangan. Pertama, fase domestifikasi keluhan dan tuntutan gerakan petani di tingkatan lokal dan nasional. Upaya

mobilisasi massa untuk menyuarakan keluhan ditingkatkan bawah dapat dipahami sebagai salah satu bentuk proses domestifikasi. Fase domestik inilah yang menjadi tumpuan utama dalam menyusun agenda kampanye dan gerakan yang lebih besar.

Kedua, fase framing global yaitu proses pembingkai isu-isu domestik dalam pengertian yang lebih luas menjadi satu isu global yang diusung oleh gerakan petani transnasional. Tarrow dalam *The New Transnational Activism* mendefinisikan *global framing* sebagai “the use of external symbol to orient local or national claims” (Tarrow, 2005). *Global framing* menunjukkan bahwa proses pertentangan politik ditingkatkan global dimulai dari kekecewaan atau perlawanan yang bersifat lokal–nasional lalu disatukan oleh satu analisa dan identifikasi yang bersifat global sehingga membentuk sebuah agenda gerakan yang bersifat global. Tugas inilah yang menjadi agenda utama APC, yaitu memaksimalkan kekuatan dan simbol-simbol perlawanan yang berkaitan dengan perampasan tanah ditingkatkan lokal.

Ketiga, fase difusi transnasional yaitu fase penyebaran bentuk aksi dan klaim kolektif menuju aksi kolektif lintas batas. Adanya agenda aksi seperti aksi atau kampanye bersama yang dilakukan dalam satu arena politik guna menentang suatu kebijakan adalah praktik nyata dari proses ini. Gerakan petani transnasional seringkali menggunakan pertemuan WTO sebagai arena untuk menunjukkan sikapnya terhadap liberalisasi pertanian yang diusung oleh WTO, pengalaman aksi penolakan WTO di Hongkong pada tahun 2005 dan KTM WTO di Bali tahun 2013 menjadi medan politik bagi APC dalam membangun interaksinya dengan gerakan petani ditingkatkan lokal, Pada agenda inilah, persebaran bentuk aksi dan klaim memungkinkan terjadi.

Selain itu, momentum peringatan terkait petani juga menjadi waktu yang ideal bagi gerakan petani untuk memperluas kampanye dan menggalang dukungan public terkait isu-isu yang mereka usung seperti isu Hari bagi Kaum Tani Tak Bertanah dan isu kedaulatan pangan atau Hari Tani yang jatuh setiap tanggal 24 September di Indonesia.

Keempat, fase eksternalisasi. Fase ini pada dasarnya adalah kebalikan dari kerja politik domestik, dimana actor domestik menargetkan aktor atau dukungan luar untuk membela kepentingan mereka. Harapannya akan memunculkan apa yang disebut oleh Keck dan Kikkink sebagai “efek boomerang” yaitu kondisi dimana tanggapan pemerintah dalam negeri tidak ditemui maka dengan keluarnya isu ini dan menjadi perhatian internasional diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan dukungan baik secara politik maupun dukungan secara sumber daya terhadap perjuangan masyarakat dalam negeri (Keck and Sikkink, 1998).

Kelima, fase pembentukan koalisi transnasional yaitu proses penciptaan jaringan transnasional untuk mendukung kerjasama lintas batas. APC adalah organisasi gerakan transnasional yang dalam terminology Tarrow dijelaskan sebagai “sustained contentious interactions with opponents – national or non-national – by connected networks of challengers organized across national boundaries”. Pemaknaan ini mendorong adanya satu aliansi atau jaringan yang kuat untuk mendukung kerja politik baik itu bersifat jangka panjang ataupun bersifat taktis atau jangka pendek.

Dampak kelima fase inilah yang memungkinkan isu gerakan petani lokal menjadi bagian dari gerakan transnasional dan pada akhirnya akan melahirkan solidaritas gerakan guna mendukung perlawanan petani di tingkatan lokal. Pada konteks inilah solidaritas dan identitas kolektif gerakan petani transnasional terbentuk dan memungkinkan lahirnya apa yang disebut oleh Tarrow sebagai *rooted cosmopolitans*, yaitu actor gerakan tingkatan lokal yang memiliki pengalaman interaksi dalam arena transnasional yang akan berbagi ide dan metode gerakan serta menjadi ruang pendidikan politik bagi organisasi lokal untuk bisa menjaga dan membentuk solidaritas mereka.

PENUTUP

Aktivisme transnasional dalam gerakan petani kontemporer adalah sebuah bentuk keniscayaan ketika tantangan yang dihadapi

oleh gerakan petani di tingkatan lokal pada dasarnya juga terus berkembang menjadi tantangan yang tidak lagi bersifat domestik tapi juga telah menjadi tantangan yang bersifat global seperti tantangan praktek perampasan tanah.

Meski bentuk dukungan gerakan petani transnasional APC masih sangat terbatas yakni masih pada tataran dukungan politik serta mobilisasi isu pada level global akan tetapi pada aspek organisasi, kehadiran mereka telah mendorong militansi petani menjadi cukup kuat.

Keyakinan petani di tingkatan organisasi lokal atas solidaritas internasional adalah langkah penting, bahwa konflik yang dikerangkai sebagai isu bersama dan nantinya akan menjadi isu kampanye di berbagai kesempatan. Pada gilirannya, upaya dalam mentransformasi gagasan-gagasan perjuangan lokal menjadi perjuangan global menjadi semakin mudah.

Aktivitas transnasional ini pada akhirnya tidak mampu membantu perjuangan lokal menjadi sebuah kekuatan gerakan yang lebih besar secara sendirian. Pimpinan organisasi dan massa tani lokal lainnya tetaplah menjadi bagian penting dalam memobilisasi massa ke dalam struktur kesempatan politik dan pembingkian aksi kolektif menuju satu gerakan yang saling berkaitan dengan gerakan lokal lainnya sebagai basis politik nasional.

Penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa implikasi dari kehadiran gerakan petani transnasional dengan struktur mobilisasi, kesempatan politik yang ada di tingkatan domestik serta strategi mobilisasi sumber daya untuk melakukan satu aksi besar secara maksimal pada akhirnya akan membawa gerakan petani lokal tersebut pada satu solidaritas yang lebih kuat. Atau, dengan kata lain bahwa persoalan solidaritas gerakan petani transnasional dan gerakan petani lokal adalah berangkat dari solidaritas menuju solidaritas gerakan yang lebih kuat lagi.

Pada perkembangannya, bentuk aktivistas transnasional diusulkan sebagai pelengkap dari aktivitas lokal dan nasional. Meski tidak selamanya berhasil sebagaimana diakui oleh Tarrow bahwa aktivitas

transnasional lebih banyak gagalnya dibanding berhasilnya dalam tradisi perlawanan global, akan tetapi, dalam beberapa kasus, aktivitas transnasional hadir untuk mempengaruhi wacana dominan dan memaksa pihak yang terkait untuk terlibat dan mendelegitimasi posisi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Asian Peasant Coalition, 2004, *Asian Peasant Coalition First General Assembly Unity Statement*, (10 Agustus 2020), diakses pada <http://asianpeasant.blogspot.com>

Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi, 2011, *Enam Dekade Ketimpangan; Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*, Bandung: Agrarian Resource Centre, Bina Desa dan Konsorsium Pembaruan Agraria

Borras Jr, Saturnino M, 2005, *La Via Campesina; Potret Gerakan Tani Transnasional*, Bandung; Garis Pergerakan Press.

Borras Jr, Saturnino M., Marc Edelman, dan Cristobal Kay (ed), 2008, *Transnational Agrarian Movements Confronting Globalization*, New York; Blackwell Publishing

Fauzi, Noer (Ed) 1997, *Tanah dan Pembangunan, Risalah dari Konferensi INFID ke-10*, Jakarta: Sinar Harapan dan INFID

_____, 1999, *Petani dan Penguasa; Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta; Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar

_____, 2003, *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria, Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global*, Yogyakarta; Insist, KPA dan Karsa

_____, 2005, *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Insist Press.

GRAIN, 2018, *With vigor of the youth, intensify the struggle for land and life!* (10 Agustus 2020) dapat diakses pada <https://www.grain.org/en/article/5922->

[with-vigor-of-the-youth-intensify-the-struggle-for-land-and-life](https://www.grain.org/en/article/5922-with-vigor-of-the-youth-intensify-the-struggle-for-land-and-life)

Komnas HAM, 2019, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2018*, (15 Agustus 2020) dapat diakses pada [https://www.komnasham.go.id/files/20190807-laporan-tahunan-komnas-ham-2018-\\$1PC.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20190807-laporan-tahunan-komnas-ham-2018-$1PC.pdf)

Larana, Enrique, Hank Johnston dan Joseph R. Gusfield, eds, 1994, *New Social Movement; From Ideology to Identity*, Philadelphia; Temple Univ. Press,

Mustamin, 2007, *Petani vs Negara; Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*, Yogyakarta; Ar Ruzz Media,.

Porta, Donatella Della dan Sindney Tarrow (ed), 2005, *Transnational Protest and Global Activism*, New York; Rowman & Littlefield Publisher, Inc

Porta, Donatella Della dan Sindey Tarrow, *Transnational Processes and Social Activism; An Introduction*, dalam Donatella Della Porta dan Sindney Tarrow (ed), 2005, *Transnational Protest and Global Activism*, New York; Rowman & Littlefield Publisher, Inc

Situmorang, Abdul Wahid, 2007, *Gerakan Sosial; Studi Kasus Beberapa Perlawanan*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar

Snow, David A., Robert D. Benford dan Scott A. Hunt, *Identity Fields; Framing Processes and the Social Construction of Movement Identities*, dalam Enrique Laraña, Hank Johnston dan Joseph R. Gusfield, eds, 1994, *New Social Movement; From Ideology to Identity*, Philadelphia; Temple Univ. Press,

Tarrow, Sidney, 2005. *The New Transnational Activism*. Cambridge: Cambridge University Press.

_____, 2011, *Power in Movement; Social Movement and Contentious Politics -3rd ed*, New York; Cambridge University Press